

**STRATEGI KOMUNIKASI DALAM MENYERAP
ASPIRASI MASYARAKAT ADAT OLEH ANGGOTA DPRD
KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT**
*Communication Strategies in Absorbing the
Aspirations of Indigenous Community by the Members
of Local Assembly of Bintuni Bay Regency West Papua Province*

**Eko Priyo Utomo,
Hafied Cangara¹, Muhammad Iqbal Sultan²**

^{1,2} Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin
Email : *priyo_utomo86@yahoo.com*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis strategi komunikasi anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat adat di Kabupaten Teluk Bintuni. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan penentuan narasumber atau informan dilakukan secara sengaja (*purposive*). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Teluk Bintuni. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi komunikasi dalam menyerap aspirasi masyarakat adat oleh anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni berbeda berdasarkan sifat dari proses penyerapan aspirasi masyarakat adat, yakni formal dan non formal, kelompok masyarakat adat, dan asal usul anggota DPRD yang bersangkutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi komunikasi di antaranya karakteristik kelompok masyarakat adat, tatanan adat, dan asal-usul anggota DPRD. Bentuk komunikasi yang terjadi antara anggota DPRD dan masyarakat adat dalam proses penyerapan aspirasi mereka, dilakukan secara verbal (menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah setempat) juga komunikasi nonverbal untuk mempertegas pesan yang disampaikan. Sedangkan pola komunikasi, untuk kelompok masyarakat adat pola komunikasi linear yang terjadi, dan untuk sebagian kelompok masyarakat pola komunikasi sirkular, atau kedua pola tersebut terjadi bersamaan.

Kata kunci: *strategi komunikasi, aspirasi, masyarakat adat*

Abstract

The aim of the research is to analyze communication strategies of the members of local assembly in absorbing the aspirations of indigenous community in Bintuni Bay Regency. The research used descriptive qualitative approach conducted in Bintuni Bay Regency. The informants were selected purposively. The methods of obtaining the data were participative observation, in-depth interview, and documentation. The results of the research indicate that communication strategies used in absorbing the aspirations of indigenous community by the members of local Assembly are various based on the characteristics of the absorption process of aspiration of the indigenous community, i.e formal and informal, the groups of indigenous community, and the origin of the members of local Assembly. The factors affecting the communication strategies are group characteristics of indigenous community, custom order, and the origin of the members of Local Assembly. The forms of communication happening between the members of Local Assembly and indigenous community in the absorption process of aspiration are verbal communication (using Indonesian and local languages) and nonverbal communication to affirm the message. Meanwhile, the communication patterns used by indigenous community are linear communication and circular communication for some groups of community or both of them are used simultaneously

Keywords: *communication strategy, aspirations, indigenous peoples*

PENDAHULUAN

Aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat secara umum, seyogyanya dijadikan salah satu pertimbangan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan arah pembangunan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini lebih nyata terlihat di era desentralisasi pemerintahan seperti saat sekarang ini. Dan lebih Nampak pada kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi khusus Papua dan Papua Barat sebagai salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Dalam menjalankan kebijakan pembangunan-nya, Pemerintah Kabupaten/Kota harus lebih melibatkan masyarakat terutama masyarakat adat setempat dalam proses pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung, demikian pula di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses perubahan yang telah direncanakan secara sistematis mengarah pada kondisi yang lebih baik. Melihat pembangunan sebagai sesuatu yang direncanakan secara sistematis, menunjukkan bahwa melaksanakan pembangunan bukanlah hal yang mudah tetapi memerlukan berbagai paradigma, model pembangunan yang tepat.

Salah satu kesalahan pembangunan pada masa lalu adalah penggunaan model pembangunan yang berorientasi pada mengejar pertumbuhan ekonomi semata, dimana proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program pembangunan kerap kali dilakukan secara *top-down*. Program yang dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah sering tidak berhasil dan kurang memberi manfaat kepada masyarakat. Masyarakat kurang dilibatkan sehingga mereka kurang bertanggungjawab terhadap program dan keberhasilannya, bantuan yang diberikan menciptakan ketergantungan yang pada

gilirannya akan lebih menyusahkan masyarakat dari pada menolongnya, serta terkadang tidak sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Berdasarkan pengalaman demikian, maka pendekatan pembangunan yang sekarang ini lebih menekan pada model pembangunan *bottom-up* yaitu pendekatan pembangunan yang berorientasi pada rakyat. Pendekatan ini menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menekankan upaya pemberdayaan (*empowerment*) terhadap rakyat menuju kemandirian.

Proses penyerapan aspirasi ini akan menjadi kegiatan yang tidak terlalu sulit dilakukan apabila masyarakat sebagai konstituennya secara aktif melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan penyampaian aspirasi seperti demonstrasi, dan dialog. Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat, anggota DPRD masih dapat menyiasatinya dengan langsung bertatap muka dengan masyarakat, atau dengan melihat dan selalu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat melalui media massa cetak maupun elektronik.

Penyerapan aspirasi akan sangat berbeda ketika anggota DPRD dihadapkan pada satu kenyataan bahwa masyarakat yang mereka wakili adalah masyarakat yang cenderung pasif dalam hal penyampaian aspirasi, kondisi geografis yang masih sulit dijangkau, dan tidak ada media massa yang mampu mengakses kelompok masyarakat ini, seperti kelompok masyarakat adat di Kabupaten Teluk Bintuni. Padahal, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan serta arah pembangunan yang memperhatikan kearifan lokal merupakan hal penting serta hak dari warga masyarakat adat di seluruh Papua dan secara khusus pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni.

Dengan berbagai realitas kehidupan dan dinamika permasalahan terkait aspirasi masyarakat adat, tentu membutuhkan satu strategi komunikasi khusus dalam penyerapan

aspirasi oleh anggota DPRD di Kabupaten Teluk Bintuni. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Demikian pula strategi komunikasi merupakan paduan dan perencanaan komunikasi (*communication planning*) serta manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung dari situasi dan kondisi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di DPRD dan kampung-kampung domisili masyarakat adat di Kabupaten Teluk Bintuni. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam tentang strategi komunikasi dalam menyerap aspirasi masyarakat adat oleh anggota DPRD di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

Obejek penelitian ini adalah pimpinan DPRD, dan Anggota DPRD (berasal dari tujuh suku maupun bukan) yang mewakili daerah pemilihan masyarakat adat (tujuh suku). Harapan dapat mengetahui bagaimana merancang strategi komunikasi dalam menyerap aspirasi masyarakat adat di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu berdasarkan pertimbangan yang erat kaitannya dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan.

Selama peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan, peneliti juga melakukan analisis data. Semua data yang telah didapat kemudian diolah melalui tiga jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992).

HASIL PENELITIAN

Strategi Komunikasi

Dalam strategi komunikasi terdapat empat faktor penting yang harus diperhatikan, yaitu mengenal khalayak, menentukan pesan, menetapkan metode, dan pemilihan media komunikasi. Dari hasil penelitian, dalam pemenuhan empat faktor tersebut, masing-masing anggota DPRD berbeda dalam pelaksanaannya. Perbedaan tersebut lebih dikarenakan oleh karakteristik kelompok masyarakat adat, tatanan adat, asal-usul anggota DPRD, dan pokok permasalahan yang terjadi. dengan begitu, strategi komunikasi, dalam menyerap aspirasi masyarakat adat di Kabupaten Teluk Bintuni berbeda dari tiap-tiap anggota, dan tidak memiliki satu model perencanaan yang tetap.

Faktor Yang Mempengaruhi

Strategi Komunikasi

Karakteristik dari masyarakat adat yang terdapat di kelompok suku (kelompok suku dataran tinggi, kelompok suku wilayah aliran sungai, dan kelompok suku pesisir pantai) merupakan satu faktor yang mempengaruhi bagaimana strategi komunikasi dalam menyerap aspirasi masyarakat adat yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni.

Sebagai contoh, karakteristik masyarakat adat yang tergabung dalam kelompok suku dataran tinggi, dengan karakteristik yang

lebih tertutup, kurang aktif terkait dengan penyampaian aspirasi mereka, dan tingkat pemahaman dan penguasaan terhadap bahasa Indonesia membuat anggota DPRD yang akan melakukan kegiatan penjangkaran aspirasi harus menggunakan penerjemah untuk anggota DPRD yang bukan berasal dari kelompok suku tersebut, dan melakukan komunikasi dengan kelompok-kelompok kecil dari masyarakat yang ada di sana, bagi anggota DPRD yang berasal dari suku tersebut.

Tatanan Adat

Tatanan adat sangat berpengaruh terhadap strategi komunikasi yang digunakan oleh anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat adat. Untuk kelompok masyarakat suku dataran tinggi, di mana tatanan adat masih begitu kuat melekat bahkan mengekang di kehidupan mereka strategi komunikasi yang digunakan adalah dengan memanfaatkan lembaga adat yang ada di kampung. Walaupun pemanfaatan kelembagaan adat ini masih diimbangi dengan bertemu secara langsung dengan tokoh-tokoh kunci yang ada di kelomok masyarakat agar mendapatkan informasi yang akurat terkait kondisi masyarakat dan memperbandingkan dengan informasi yang diperoleh melalui kelembagaan adat.

Asal Usul Anggota DPRD

Asal-usul anggota DPRD, apakah anggota tersebut berasal dari salah satu suku yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni, atau pun yang berasal dari Nusantara, turut membedakan bagaimana strategi komunikasi yang akan digunakan oleh anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat adat.

Penyerapan aspirasi masyarakat, yang dilakukan oleh anggota DPRD yang berasal dari suku yang ada (putra daerah) di kawasan dataran tinggi, proses penyampaian pesan dilakukan secara langsung (dalam dialog) dan tidak langsung (kelompok berdasarkan ketokohan)

sedangkan bagi anggota DPRD yang non Papua (Nusantara) proses penyampaian pesan dan penerimaan pesan dilakukan melalui peran penerjemah.

Selain itu dalam proses pengenalan khalayak asal usul anggota DPRD sangat mempengaruhi strategi komunikasi. Bagi anggota DPRD non Papua (Nusantara) informasi mengenai khalayak (masyarakat adat) harus menggunakan agen-agen informasi.

Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan atau permasalahan yang terjadi, turut berpengaruh terhadap strategi komunikasi yang digunakan oleh anggota DPRD, untuk penanganan permasalahan yang berada di ranah adat, dilakukan dengan komunikasi yang menggunakan ruang atau sarana adat. Sedangkan untuk permasalahan yang tidak berkaitan dengan adat cenderung lebih menyesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana dalam proses dialog.

Pokok persoalan berpengaruh besar, terutama dalam proses perumusan isu dan mengolah isu tersebut menjadi pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat, apakah pesan tersebut berkaitan dengan pembahasan dalam periode sidang, atau permasalahan tersebut merupakan konflik yang melibatkan masyarakat adat.

Pola Komunikasi

Pola komunikasi yang terjadi antara anggota DPRD dan masyarakat adat dalam proses penyerapan komunikasi, tidak semuanya sama. Perbedaan ini terdapat pada penyerapan komunikasi yang dilakukan oleh anggota DPRD non Papua (Nusantara) di kawasan dataran tinggi, di mana proses pertukaran pesan dilakukan melalui perantara penerjemah. Sedangkan untuk anggota DPRD yang berasal dari suku di dataran tinggi, pola pertukaran pesan dilakukan melalui dua cara, yakni secara langsung pada saat dialog dan dengan

menggunakan perantara.

Dalam dialog yang melibatkan anggota DPRD non Papua dan masyarakat adat, komunikator (anggota DPRD) tidak dapat langsung menerima umpan balik dari komunikan (masyarakat). Umpan balik baru akan diterima setelah melalui proses komunikasi yang dilakukan oleh penerjemah di luar dialog tersebut. Sedangkan pola komunikasi yang terjadi dengan kelompok kecil berdasarkan ketokohan dalam masyarakat, pertukaran pesan dilakukan pada saat itu juga, di mana masing-masing dari peserta komunikasi saling bertukar peran antara komunikator dan komunikan, hal ini sama dengan yang terjadi antara anggota DPRD non Papua.

Untuk dua daerah lainnya, yakni kawasan aliran sungai dan pesisir pantai, pola komunikasi berjalan lebih terbuka, di mana pertukaran pesan di antara peserta komunikasi berjalan dengan baik, demikian juga pertukaran peran antara komunikator dan komunikan.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat teori yang dianggap memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah. Keempat teori tersebut yaitu Teori Interaksi Simbolik, Teori Konvergensi, Teori Kode Bicara, dan Teori Aturan “Kontingensi”.

Dari keempat teori yang digunakan ini, terdapat relevansi atau keterkaitan pada tiga teori yakni Teori Pengelolaan Ketidakpastian, dan Teori Kode Bicara. Sedangkan untuk Teori Aturan “Kontingensi” tidak sepenuhnya memiliki keterkaitan. Keterkaitan lainnya antara hasil penelitian dan teori ini terletak pada bagaimana anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dalam menyerap aspirasi masyarakat adat.

Anggota DPRD baik yang berasal dari salah satu tujuh suku maupun yang tidak, selalu memiliki gambaran atau pemahaman terhadap masyarakat adat tertentu sebagai obyek dalam penyerapan aspirasi mereka. Pemahaman tersebut berkaitan dengan budaya, aturan, nilai dan norma yang berlaku, hingga pada tingkat kemampuan dalam berkomunikasi secara verbal dengan menggunakan bahasa yang umum dan dipahami oleh anggota DPRD maupun kelompok masyarakat tersebut.

Dari pemahaman yang dimiliki oleh anggota DPRD sebagai bentuk pemaknaan terhadap kelompok masyarakat adat yang menjadi dasar dalam menentukan strategi komunikasi dalam menyerap aspirasi mereka. Hal ini terlihat pada anggota DPRD yang bukan berasal dari kelompok tujuh suku lebih memilih menggunakan agen (orang lain) sebagai pengumpul pesan dan informasi tentang apa yang terjadi dan aspirasi yang berkembang di kelompok masyarakat adat. Selain itu, agen ini juga berperan sebagai perantara dalam menyampaikan informasi mengenai individu anggota DPRD tersebut.

Tabel 2.1. Asumsi dan Keterkaitan Teori Interaksi Simbolik

Asumsi Teori	Keterkaitan
1. Pentingnya makna bagi perilaku manusia	Tujuan penyerapan aspirasi, yang dilakukan dengan berdialog bersama masyarakat adat adalah untuk memiliki kesamaan pemaknaan terkait sebuah permasalahan tertentu yang ada di tengah-tengah masyarakat adat
2. Pentingnya konsep mengenai diri	Adanya kesadaran di sebagian anggota DPRD akan kewajiban dan tanggung jawab politiknya sebagai wakil rakyat, terutama kelompok-kelompok masyarakat adat

<p>3. Hubungan antara individu dengan masyarakat</p>	<p>Dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat, informasi awal tentang masyarakat adat merupakan langkah yang didahulukan dengan maksud pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat tersebut tidak melanggar norma adat dan kerarifan lokal yang ada</p>
--	---

Keterkaitan selanjutnya, tentang penggunaan bahasa sebagai cara dalam memperoleh makna atas sesuatu hal dalam proses interaksi. Untuk memaknai bagaimana sesungguhnya aspirasi yang dimiliki atau berkembang di tengah-tengah kelompok masyarakat adat, bahasa sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi strategi komunikasi anggota DPRD dalam menyerap aspirasi, tidak dapat dielakan penggunaannya atau bahkan diabaikan. Oleh karena begitu pentingnya bahasa, anggota DPRD yang berasal dari kelompok tujuh suku lebih memilih menggunakan bahasa daerah yang sama-sama meraka pahami baik anggota DPRD sendiri maupun anggota kelompok masyarakat adat.

Bagi anggota DPRD yang bukan berasal dari kelompok tujuh suku, dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat adat di Kabupaten Teluk Bintuni dalam proses pelaksanaannya, melalui dialog lebih memilih menggunakan perantara penerjemah sebagai cara agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat adat sebagai komunikasi. Begitupun sebaliknya, menerima pesan dari masyarakat adat baik pada saat dialog berlangsung maupun melalui proses komunikasi dengan tokoh-tokoh kunci dan kelompok kecil.

Hal ini merupakan hasil dari pertimbangan anggota DPRD tersebut ketika dihadapkan pada

situasi di mana masyarakat yang dirinya hadapi adalah kelompok masyarakat yang memiliki tingkat keaktifan dalam berkomunikasi begitu kecil, dan kemampuan komunikasi verbal dengan menggunakan bahasa Indonesia yang kurang.

Tabel 2.2. Asumsi dan Keterkaitan Teori Konvergensi

Asumsi	Keterkaitan
<p>Komunikasi cenderung bergerak ke satu titik temu untuk mencapai pengertian bersama</p>	<p>Dalam proses penyerapan aspirasi, proses penyampaian pesan tidak hanya dilakukan pada saat dialog saja. Akan tetapi juga melalui kelompok-kelompok kecil berdasarkan kriteria tertentu. Pada komunikasi tahap ini, proses komunikasi mengarah pada satu titik dan pengertian serta pemahaman dari tiap-tiap pelaku komunikasi.</p>

Proses komunikasi yang melibatkan kelompok-kelompok kecil berdasarkan kriteria tertentu seperti gender, marga, dan kedekatan tempat tinggal maupun dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan pemuda, komunikasi cenderung bersifat konvergen atau bertemu di satu titik.

Titik pertemuan tersebut berupa pengertian dan pemahaman dari masing-masing peserta komunikasi, baik itu anggota DPRD maupun anggota kelompok tentang pesan yang disampaikan oleh anggota DPRD terkait kebijakan misalnya Rancangan Peraturan Daerah, maupun tingkat pemahaman yang dari permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat adat oleh anggota DPRD.

Tabel 2.3. Asumsi dan Keterkaitan Teori Kode Berbicara

Asumsi	Keterkaitan
Teori kode berbicara merupakan bentuk pola komunikasi yang dimiliki kelompok masyarakat berdasarkan budaya, latar belakang dan konstruksi sistem sosial.	Bagi anggota DPRD yang berasal dari kelompok tujuh suku, mereka akan terintegrasi secara langsung dengan sistem budaya yang mereka miliki, dan kode bicara. Sedangkan untuk anggota DPRD yang bukan berasal dari tujuh suku, lebih memilih untuk menyesuaikan pesan yang mereka sampaikan kepada masyarakat adat berdasarkan latar belakang dan sistem budaya yang ada.

Dalam proses penyampaian pesan secara langsung melalui dialog, pesan disampaikan sesederhana mungkin, dengan tanpa menggunakan istilah-istilah sebagai simbol bahasa, menggunakan bahasa serapan yang jamak berlaku di dalam masyarakat adat, serta menyesuaikan pesan-pesan tersebut berdasarkan konteks pola komunikasinya.

Dalam menyerap dan menampung pesan yang disampaikan oleh masyarakat adat yang cenderung lebih tertutup karena faktor tatanan adat, para anggota DPRD yang bukan berasal dari salah satu kelompok tujuh suku menyiasati hal itu dengan memaksimalkan peran agen informasi, melalui komunikasi kelompok skala kecil yang berdasarkan kedekatan tempat tinggal, maraga (*fam*) dan gender.

Tabel 2.4. Asumsi dan Keterkaitan Teori Aturan “kontingensi”

Asumsi	Keterkaitan
1. Orang bertindak berdasarkan tujuan tertentu, dan dipengaruhi akan hasil yang didapat	Tujuan dari proses penyerapan aspirasi merupakan hasil dari sebuah perkiraan atau gambaran yang sebelumnya telah dimiliki oleh anggota DPRD tersebut.
2. Persuasi lebih dipengaruhi pada pilihan-pilihan pribadi daripada pengaruh orang lain	Dalam pemilihan bagaimana pesan akan disampaikan dan dengan menggunakan metode apa lebih pada pilihan berdasarkan pemahaman anggota DPRD yang bersangkutan.
3. Ganjaran dari orang lain hanya berarti dalam konteks tujuan dan ukuran pribadi seseorang	

Untuk teori ini, memiliki relevansi dengan hasil yang didapat oleh peneliti terkait dengan strategi komunikasi yang digunakan dalam menyerap aspirasi masyarakat adat oleh anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni. Relevansi tersebut terletak pada penyusunan atau menentukan strategi komunikasi, hingga pelaksanaan penyerapan aspirasi sebelumnya para anggota DPRD ini telah mereka-reka tentang hasil yang akan didapat dalam proses penyampaian pesan maupun penyerapan aspirasi masyarakat adat.

Sedangkan terkait pilihan-pilihan dari cara apa yang akan digunakan agar proses penyampaian pesan dan penjangkaran aspirasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan, menjadi hal yang berbeda dengan teori ini. Dalam menentukan pemilihan saluran komunikasi, pola komunikasi, dan proses pelaksanaan penyerapan aspirasi dari tiap-tiap anggota DPRD terutama yang bukan berasal dari kelompok tujuh suku tidak sepenuhnya berdasarkan pilihan mereka sendiri. Akan tetapi dipengaruhi oleh pendapat dan pengalaman

serta informasi yang diberikan oleh orang lain.

Pendapat, pengalaman dan informasi bisa dalam bentuk pesan yang disampaikan oleh orang lain tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika pelaksanaan dialog. Selain itu, tatanan adat sebagai bentuk konstruksi sosial pun turut mempengaruhi pemilihan strategi komunikasi yang akan digunakan.

KESIMPULAN

Strategi komunikasi dalam menyerap aspirasi masyarakat adat oleh anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni berbeda berdasarkan sifat dari proses penyerapan aspirasi masyarakat adat, yakni formal dan non formal, kelompok masyarakat adat, dan asal usul anggota DPRD yang bersangkutan.

Secara formal, strategi komunikasi melewati tahapan komunikasi di tingkat organisasi, baik dengan pimpinan maupun dengan sesama anggota komisi dan fraksi serta partai politik. Komunikasi berlangsung secara dua arah, dimana semua pihak yang bersangkutan sangat komunikatif. Proses pelaksanaan penyerapan aspirasi melalui empat tahapan perencanaan komunikasi, yaitu mengenal khalayak, menentukan pesan, metode penyerapan aspirasi, dan pemilihan sarana komunikasi. Dalam tahapan tersebut, masing-masing anggota DPRD berbeda berdasarkan daerah yang diwakili, dan asal-usul kesukuan.

Faktor-faktor yang memengaruhi strategi komunikasi di antaranya karakteristik kelompok masyarakat adat, tatanan adat, dan asal-usul anggota DPRD. Karakteristik kelompok, tatanan adat, asal-usul anggota DPRD dan pokok persoalan yang terjadi.

Bentuk komunikasi yang terjadi antara anggota DPRD dan masyarakat adat dalam proses penyerapan aspirasi mereka, dilakukan secara dua tahap untuk anggota DPRD yang bukan berasal dari kelompok tujuh suku, serta

bentuk komunikasi konvergensi untuk baik yang berasal dari kelompok tujuh suku maupun bukan. Sedangkan pola komunikasi untuk kelompok masyarakat adat pola komunikasi linear yang terjadi, dan untuk sebagian kelompok masyarakat pola komunikasi sirkular, atau kedua pola tersebut terjadi bersamaan. Sarana dalam berkomunikasi dilakukan secara verbal (menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah setempat) juga komunikasi nonverbal untuk mempertegas pesan yang disampaikan, atau keduanya digunakan secara bersamaan.

Perlu adanya aturan yang jelas dan ketetapan mengenai kewajiban seorang anggota DPRD, terkait waktu kunjungan dan penyerapan aspirasi masyarakat adat. Selain itu pengembangan bagian atau divisi yang secara khusus bertugas menyusun, menganalisis, dan mengelompokkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kelompok masyarakat adat. Selain itu, pengenalan teknologi komunikasi modern kepada masyarakat harus segera dilakukan.

Peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat terhadap pentingnya aspirasi mereka, dengan memanfaatkan kelembagaan pemerintah kampung, lembaga keagamaan, terutama tokoh-tokoh kunci seperti tokoh agama dan tokoh pemuda melalui kegiatan-kegiatan pelatihan.

Memberikan rekomendasi atau bentuk himbauan kepada partai-partai politik dalam rekrutment kader serta calon-calon anggota legislatif agar lebih mengutamakan dan memberdayakan orang-orang yang berasal dari tujuh suku.

Memberikan rekomendasi terhadap peran dan fungsi lembaga masyarakat adat dan koordinator tujuh suku dalam menampung dan mengakomodir kepentingan masyarakat tujuh, dan melibatkan lembaga tersebut dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, Moh. 1998. *Psikologi Industri*, Edisi Keempat. Liberty : Yogyakarta
- Atkinson, & Hilgard. 2001. *A Theory of Achievement Aspiration*. Wiley: New York
- Aw, Suranto. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- BPS Kabupaten Teluk Bintuni. 2012. *Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Angka 2012*. Stisindo.
- Cangara, Hafied. 2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Grafindo : Jakarta
- 2011. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Ed 1,-- 3.bRajawali Press : Jakarta
- 2013. *Perencanaan dan Strategi komunikasi*. Rajagrafindo Persada : Depok
- Danim, Sudarwan. 2004. *Motivasi, Kepemimpinan dan Efektivitas Kelom-pok*. Rineka Cipta.: Jakarta
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Cetakan kesembilanbelas. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Effendy, Onong Uchjana. 2005. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Gibson, Ivancevich & Donnelly. 1996. *Organisasi, Perilaku – Struktur – Proses*. Edisi Kedelapan. Binarupa Aksara: Jakarta
- Hazin, Nur, Kholil. 1999. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Terbit Terang: Surabaya
- Karaf, A.S. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Penerbit Buku Kompas : Jakarta Kencana: Jakarta
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 1998. *Perilaku Konsumen*. Eresco: Bandung
- Miles, M & Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press : Jakarta
- Morissan, Wardhany Andy Corry. 2009. *Teori Komunikasi: tentang komunikator, pesan, percakapan, dan hubungan*. Ghalia Indonesia: Bogor
- Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Ruslan, Rosady. 2001. *Manajemen Humas & Manajemen Komunikasi (Konsepsi dan Aplikasi)*, Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Salusu, J. 2000. *Pengambilan Keputusan Strategik. Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non-Profit*. Grasindo: Jakarta
- Santoso, Edi. Setiansah Mite, 2010. *Teori Komunikasi. Edisi Pertama*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Sendjaja, Sasa, Djuarsa. dkk. 2009. *Teori Komunikasi*. Ed 2. Universitas Terbuka : Jakarta
- Siahaan, S.M, 1990. *Komunikasi : pemahaman dan penerapannya*. Gunung Mulia: Jakarta
- Littlejhon, W. Stephen, Foss, A. Karen, 2009. *Teori Komunikasi : Theories of Human Communication*. Salemba Humanika: Jakarta
- Tjiptono, Fandi. 1997. *Strategi Komunikasi (pengantar Studi)*. Rineka Cipta : Jakarta
- Umar, Husein, 2001. *Riset Akuntansi: Metode Riset Sebagai Cara Penelitian Ilmiah*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- West, Richard. Turner, Lynn, H. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi : Analisis dan Aplikasi*. Ed 3. Salemba Humanika : Jakarta

